**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM**

**NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasusu di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT**

**BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF HOME**

**STATE NUMBER 113 OF 2014**

**(Case Study in Garongan Village, Panjatan District, Kulon Progo Regency)**

**Tri Anjar Lestari**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

[**Tri.anjar90@gmail.com**](mailto:Tri.anjar90@gmail.com)

**M. Budiantara, SE., M.Si., Ak., CA**

**Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**JL. Raya Wates KM.10 Karanglo, Arrgomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa tahun 2018 di Desa Garongan, mengenai bagaimana kesesuaian antara proses pengeloaan keuangan keuangan desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kuaitatif dengan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan yaitu dengan: mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan Men-*Coding* data, menerapkan proses *Coding* untuk mendeskripsikan *setting,* orang – orang, kategori – kategori, dan tema – tema yang akan dianalisis, menunjukkan deskripsi data dan membuat tabel perbandingan pengeolaan keuangan desa, menginterpretasikan atau memaknai data. Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun masih ada yang beum sesuai dengan proses pengelolaan keuangan di desa Garongan yaitu dalam proses perencanaan penyampaian RAPBDes kepada Kepala Desa mengalami keterlambatan.

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

ABSTRACT

*This study aims to find out how the village financial management process in 2018 in Garongan Village is about the suitability of the village financial management process with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. This study uses qualitative research with a comparative approach. Data collection techniques are done by interview, observation, and documentation. Data analysis techniques used are: preparing and processing data for analysis, reading all data, analyzing in more detail with data coding, applying the coding process to describe the settings, people, categories, and themes to be analyzed. , show a description of the data and make a comparison table of village financial management, interpret or interpret the data. The results of this study indicate that the process of village financial management in Garongan Village, Panjatan District, Kulon Progo Regency is generally in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. However, there are still some that are not in accordance with the financial management process in Garongan village, namely in the planning process the submission of the RAPBDes to the Village Head has been delayed.*

***Keywords:*** *village financial management, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan pemerintahan Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Menurut Intitute Development of Economics and Finance (2017), “Otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar”. Kesenjangan ini masih sering terjadi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota disebabkan karena belum meratanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah merintis untuk dilaksanakannya otonomi desa dan desentralisasi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki wewenang dalam melakukan pemberdayaan wilayah dan masyarakat, termasuk masyarakat desa guna menuju kesejahteraan bersama.

Program otonomi desa dan desentralisasi fiskal tersebut didukung oleh pemerintah pusat melalui dana Desa. Menurut Menteri Keuangan, “Dana desa untuk tahun 2018 secara raisonal dianggarakan sebesar 60 triliun rupiah”. Dana ini tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat desa apabila dalam pengelolaannya berjalan dengan baik. Menurut Kumalasari (2016), “kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa”. Namun faktanya masih ada beberapa desa yan masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Menurut hasil pemanatuan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kompas.com pada 2018 tercatat jumlah korupsi di desa yang terus naik setiap tahunnya dari 2015 sampai dengan semester I 2018. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha. Pada tahun ke dua jumlah meningkat menjadi 41 kasus Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi," kata Egi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Setiap Tahun Sekitar Rp 35 Juta Akan Raib... "Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang," ujar Egi. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. Misalnya, perlu ada pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu diberikan bimbingan teknis bagi aparatur desa.

Dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar dapat diumumkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa agar tidak terjadi penyelewengan pengelolaan keuangan desa.

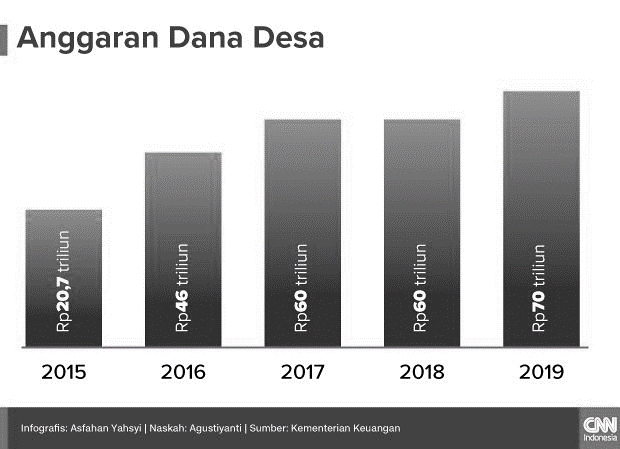
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, Menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai kepada proses pertanggungjawaban. Menurut Septarini dan Elisabeth (2016), “Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana yang berasal dari Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai”

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yag diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Dana desa diberikan setiap tahun kepada setiap desa guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Gambar 1.1 merupakan Anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai Agustus 2019. Pada gambar tersebut, peneliti melihat tren kenaikan anggaran dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang nominalnya sama.

**Gambar 1.1**

**Anggaran Dana Desa 2015-2019**



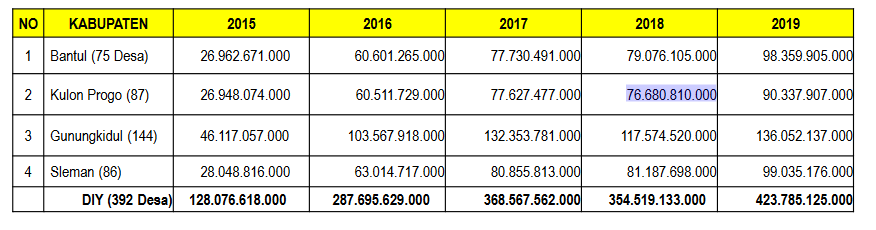
**Sumber :** Anggaran Dana Desa. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Website Kementrian Keuangan pada tahun 2018, Pemerintah Pusat akan mencairkan dana desa sebesar 60 Triliun rupiah. Melalui dana desa maka desa diharapkan dapat mengembangkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta melahirkan inovasi dan kreasi untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Semua proses tidak terlepas dari peran aktif masyarakat desa.

Kebupaten Kulon Progo merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa dari APBN untuk disalurkan ke desa-desa di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa Provinsi /Kabupeten /Kota dalam APPBN T.A. 2019, Kabupaten Kulon Progo menerima dana sebesar Rp76.680.810.000. Tabel 1.1 memberikan gambaran terkait dengan Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta.

**Tabel 1.1**

**Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta**



**S*umber :*** *Biro Tata PemerintahanSetdaDIY*

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Garongan yang terletak di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Desa Garongan sendiri berada di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan laut selatan yang merupakan kawasan pantai. Mayoritas mayarakat di Desa Garongan mata pencahariannya sebagai petani. Selain itu untuk anggaran dana desa digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.

Pemerintah Desa yang melakukan pengaturan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan wujud Pemerintah Desa dalam mengatur peraturan desa. Keuangan desa yang dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 akan berdampak baik bagi desa Garongan. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa di desa Garongan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Menurut Creswell (2014) penelitian studi kasus adalah “pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibakan beragam sunber informasi”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan in adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Peneliti akan mrmbandingkan proses pengelolaan keuangan di desa Garongan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten kulon progo. Penelitin dilakukan pada 2019 – Januari 2020. Alasan peneliti memilih Desa Garongan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Garongan, apakah pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

**Subjek dan Objek Penelitian.** Subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa Garongan, Sekertaris Desa Garongan, Bendahara Desa Garongan, BPD Desa Garongan, dan perwakilan Desa Garongan.Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Garongan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapaoran dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Proses pengelolaan keuangan desa ini ada Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDesa) Garongan, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2018.

Jenis dan Sumber Datayang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.Data Primerpada penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan juga melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti.Data Sekunderpada peneliti memperoleh data ini dari dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Garongan, dan APBDes 2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Wawancara **,**Observasi dan Dokumentasi

**Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti pada penelian kualitatif berperan sebagai human instrumen yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, anlisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2016:222). Berdasarkan hal tersebut, peneliti menjadi instrumen penelitian itu sendiri, dimana instrumen penelitian dapat didukung dengn data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi.

Wawancara mendalam dan dokumentasi akan berfokus pada hal sebagai berikut :

1. Apakah Proses Perencanaan APBDes di Desa Garongan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang disusun berdasarkan RKPDes tahun berkenanan oleh Sekertaris Desa, Kepala Desa, BPD, Camat, Bupati Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apakah Proses Pelaksanaan keuangan di Desa Garongan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dilakukan melalui rekening kas desa, serta bendahara desa membuat pertanggungjawaban menganai penerimaan dan pengeluaran kas Desa Garongan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo ?
3. Apakah Proses Penatausahaan di Desa Garongan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Bendahara Desa setiap ahkir bulan dan disampaikan kepada Kepala Desa Garongan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo ?
4. Apakah Proses Pelaporan di Desa Garongan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yan dilakukan setiap semester yaitu semester pertama dan laporan semester akhir tahun?
5. Apakah Proses Pertanggungjawaban di Desa Garongan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala Desa bersama Bupati setiap akhir tahun anggaran?

**Teknk Analisa Data**

Menurut Sugiyono (2016:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Peneliti akan melakukan beberapa langkah untuk menjawab pertanyaan tentang “Apakah pengelolaan keuangan desa di desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?”. Berikut ini merupakan 6 langkah menganalisis data kualitatif menggunakan acuan dari Creswell (2010:276-277) antara lain yaitu Mempersiapkan dan Mengolah Data untuk Dianalisis**,** Membaca Keseluruhan Data, Menganalisis Lebih Detail dengan Men*-Coding* Data**,** Menerapkan Proses *Coding* untuk Mendeskripsikan *Setting,* Orang-Orang, Kategori-Kategori, dan Tema-Tema yang akan dianalisis **,** Menunjukan Deskipsi Data dan Membuat Tabel Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Menginterpretasi atau Memaknai Data

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pembahasan**

Dari analisis tabel perbandingan tabel maka peneliti akan menjawab rumusan masalah tetang “apakah pengelolaan keuangan di desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?”. Peneliti akan mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan proses pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. **Proses Perencanaan Keuangan Desa di desa Garongan**

Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya ada satu ketentuan yang belum sesuai yaitu pasal 20 ayat (4) dimana didalam Permendagri Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober namun di Desa Garongan menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa pada bulan November karena terjadi keterlambatan dalam penyampaian RAPBDes.

Sedangkan mengenai ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yaitu di Desa Garongan Sekertaris desa menyusun RAPBDes dimulai dengan musyawarah dukuh, musrengbangdes yang disusun sesuai tahun berkenaan, kemudian sekertaris desa akan menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa setelah itu Kepala Desa akan menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama kemudian akan diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat kurun waktu dua hari setelah disepakati untuk dievaluasi, kemudian Camat akan menetapkan hasil evaluasi RAPBDes maksimal satu minggu. Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes maka pemerintah desa dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila Camat memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan yang ada di desa Garongan maka Kepala Desa Garongan melakukan penyempurnaan kurun waktu tujuh hari. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa maka akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati akan membatalkan sesuai keputusan Bupati, apabila terjadi pembatalan Peraturan Desa maka akan menggunakan pagu APBDes tahun sebelumnya dan hanya dapat melakukan pengeluaran-pengeluaran dan apabila peraturan desa batal maka Kepala Desa akan mencabut Peraturan Desa. Bupati mendelegasi evauasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat, kemudian Camat menetapkan hasil evaluasi kurang lebih dua tiga hari setelah pemaparan apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes dalam sepuluh hari maka pemerintah desa dapat melaksanakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dengan catatan yang diajukan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan perundang-undangan, kepala desa melakukan penyempurnaan selama tujuh hari, selanjutnya Kepala Desa selalu melakukan evalusi tepat waktu yang telah ditentukan dan apabila kepala desa tidak menindaklanjuti maka akan digunakan untuk peraturan Desa.

1. **Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di desa Garongan**

Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Npomor 113 Tahun 2014, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan menggunakan rekening kas desa, rekening desa sendiri di desa Garongan digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaarn kas yang nominalnya besar karena tidak semua transaksasi menggunakan rekening kas dan untuk nominal yang kecil akan dilakukan secara langsung sesuai yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Semua penerimaan dan pengeluaran kas harus disertai dengan bukti yang sah seperti kwitansi Ben26. Pengeluaran tidak dapat dilakukan selama belum ada pengesahan mengenai peraturan desa.

Apabila ada biaya yang timbul saat terlaksananya kegiatan tidak dapat dilakukan pencairan dana karena tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Dalam pengauan dana Tim Pelaksana Kegiatan harus mengajukan RAB yang sudah diverifikasi oleh Kepala Desa kemudian TPK membuat buku pembantu kas untuk membantu membuat LPJ. TPK mengajukan SPP Kepada Kepala Desas setelah kegiatan terlaksan, SPP sendiri berupa Kwitansi, RAB dan Laporan Pertanggungjawaban.

Prosedur pengajuan dana spp diverfikasi oleh Sekertaris, ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian diserahkan Bendahara untuk pencairan dana dan akan dicatat sebagai pengeluaran.

1. **Proses Penatausahaan Keuangan Desa di desa Garongan**

Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara, Sekertaris dan staf staf Desa Garongan. Bendahara Desa melakukan Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas desa. Bendahara desa dalam mempertanggungjawabakannya maka bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap satu bulan sekali, kemudian laporan pertanggungjawaban akan dilaporkan kepada Kepala Desa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam penatausahaan penerimaan pengeluaran dana desa maka Bendahara desa Garongan menggunakan buku kas, buku pembantu bank dan buku pajak.

1. **Proses Perlaporan Keuangan Desa di desa Garongan**

Proses pelaporam keuangan desa di Desa Garongan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Mengenai ketentuan yang sudah sesuai yaitu Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semesteran dan laporan tahunan.

Laporan semester awal terdiri dari laporan realisasi APBDes yang dilaporkan paling lambat bulan Juli, sedangkan laporan semester akhir akan dilaporkan pada Januari tahun berikutnya

1. **Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa Garongan**

Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri dimana Laporan pertanggungjawaban disepakati dan disahkan bersama dengan BPD sebelum disampaikan kepada Camat, yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran desa. Laporan akan dijadikan Peraturan Desa sebelum diserahkan kepada Bupati. laporan pertanggungjawaban desa merupakan laporan penyelenggaran desa akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban APBdes disampaikan kepada masyarakat melalui kepala dusun masing masing. Selain disampaikan melalui dukuh masing masing disampaikan juga menggunakan banner, website desa. Laporan realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses perencanaan di Desa Garongan sebagian besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada yang belum sesuai yaitu dalam proses penyampaian RAPBDes kepada Kepala Desa mengalami keterlambatan
2. Proses pelaksanaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
3. Proses penatausahaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
4. Proses pelaporan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
5. Proses pertanggungjawaban di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
6. **SARAN**

Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Garongan, dalam proses perencanaan jangan sampai melebihi batas waktu penyampaian RAPBDes yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aditya, Stefanus Dimasis. 2018. *“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Srudi Kasus di Desa Sambirejo, Keamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)”.* Skripsi

Alfindasari, *Dessy. “Teknik Samping pada Penelitian Kualitatif”.*https://www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019

Aria H, Giofani Inge. 2019. “ *Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten nabire Provinsi Papua)*”. Skripsi

BPKAD, BANJAR. 2016. Tahap Kegiatan Pengelolaan Desa. <http://bplad.banjar.go.id/index.php/2016/05/26/tahapan-kegiatan-pengelolaan-desa/>. Diakses tanggal 13 Desember 2017.

Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Erlangga, Jakarta.*

Carla, Yosephine. 2018. *“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa*

*Berdasarkan Acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta)”.* Skripsi

Creswell, Jhon W. 2009. *Research Design :* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantiafi, dan Mixed.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Creswell, Jhon W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di antara Lima Pendekatan) Edisi Keiga.* Jakarta : Pustaka Pelajar.

Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan B. 2016. “ Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Ilmu dan*

*Riset Akuntansi*. Vol. 5. (November). No. 11: 1-7

Nugroho, A. J., & Budiantara, M. (2017). Factors Affecting Financial Performance Of District/City Local Government Of Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, *2*(1), 21-34.

Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). Dasar-Dasar Statistik Penelitian.

Pradana, Herybertus Yudha. 2018. *“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa*

*Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 113 Tahun 2014 (Studi*

*Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabepaten Kulon Progo)”*

Skripsi.

Pratiwi, Sinta P. 2019. “ *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaam, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban APB Desa (Srudi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”* Skripsi.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang*

*Pengelolaan Keuangan Desa*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang*

*Pengelolaan Keuangan Desa.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Rini, Berlian Putri Maha. 2019. *“Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi*

*Pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,*

*Kabupaten Bantul”*. Skripsi.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabet.

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*